

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu badan usaha yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam kehidupan perekonomian, bank memegang peranan penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dimana hal tersebut merupakan catatan keberhasilan suatu perbankan. Semakin banyak dana yang dihimpun, maka menandakan indikasi apabila bank bersangkutan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, dimana pendanaan sebagian operasional – operasional bisnis perbankan berasal dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, bisnis perbankan tidak dapat berkembang dengan pesat.

Di Indonesia perbankan telah mendapatkan kepercayaan yang penuh dari masyarakat, terbukti dengan pertumbuhan dan perkembangan berupa macam-macam kegiatan operasional dan jenis-jenis produk yang dimiliki oleh bank. Selain itu bank juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank disuatu negara dapat dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian pada negara tersebut. Sektor perbankan merupakan jantung dalam sistem perekonomian sebuah negara dan alat dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Sejak terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997, sektor perbankan mulai mengalami gejolak krisis kepercayaan dari masyarakat. Krisis moneter yang terjadi, telah mengacaukan

bisnis perbankan di Indonesia, bank yang mengandalkan bisnisnya dalam bidang perkreditan hancur akibat yang ditimbulkan dari bisnis pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Namun pada tahun 1999 kondisi perbankan nasional mulai menunjukkan perkembangan ke arah perbaikan meskipun mengalami tahapan – tahapan yang sulit dalam rangka konsolidasi dan menyeimbangkan posisi keuangan. Hal ini tercermin dari perkembangan positif pada aspek pendanaan, permodalan, profitabilitas, dan kualitas aktiva produktif.

Kehidupan perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah termasuk dalam hal ini adalah Bank Indonesia, bertindak memberikan pengarah dan bimbingan pada pertumbuhan dunia perbankan, sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.

Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai pengumpul dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada unsur kepercayaan dan hukum, suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk – produk yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat dalam bentuk “kredit”. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang dalam tata bahasa Indonesia memiliki arti kepercayaan. Dengan demikian, dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui sesuatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hukum antar keduanya. Pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tidak dicantumkan secara tegas

apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit, bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan atas kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa. Namun dengan demikian, sangat disadari bahwa kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank harus diimbangi dengan kemampuan bank untuk mengendalikan berbagai jenis resiko yang timbul.

Kemudian untuk memperlancar operasinya, bank mendirikan cabang di daerah-daerah dengan tujuan memberikan pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah. Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat menguntungkan semua pihak diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu tujuan pembangunan nasional dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi bank, dengan adanya cabang tersebut akan memperbesar dan memperluas pemberian kredit khususnya kepada usaha mikro kecil menengah. Bagi masyarakat, dengan adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kredit.

Salah satu bentuk kredit yang diberikan oleh pihak bank yaitu dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang ada belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 ayat 1 menyatakan "Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana dll. Sementara pasal 2 menyatakan "Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha." Dari Undang-Undang tersebut jelas menyatakan bahwa dunia usaha seperti bank, harus berperan aktif dalam pengembangan UMKM dalam hal ini dari segi permodalan dengan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM.

Di banyak negara, UMKM memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia. Tercatat jumlah UMKM di negara maju rata-rata mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada. Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM. Sektor ini setiap tahunnya rata-rata memberikan kontribusi sebesar 35% pada produk domestik bruto, serta mampu mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negara tersebut.

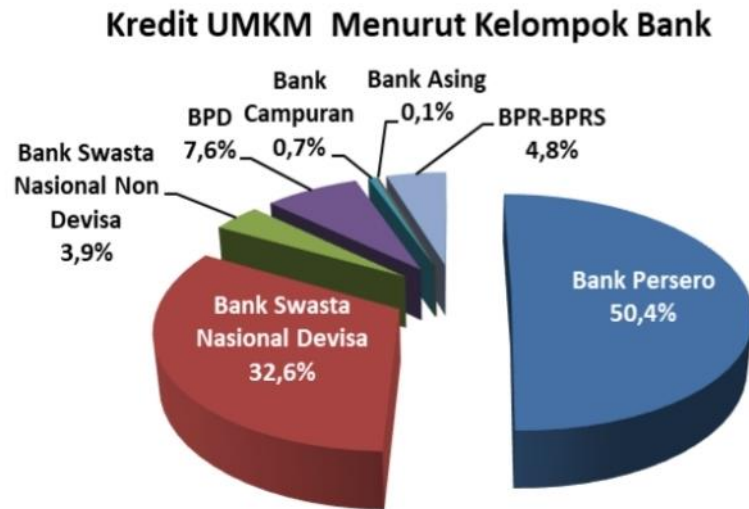
Pencapaian yang luar biasa dan potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha serta masalah pemasaran produk kepada masyarakat. Pada dasarnya UMKM memiliki

peluang yang besar untuk mendapatkan kredit sebagai suntikan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan. Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2017 ditargetkan sekitar Rp 106,6 triliun. Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses pada perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan. Namun pada prakteknya realisasinya jauh dari target Rp106,6 triliun yakni hanya sebesar Rp91,3 triliun. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. (KajianLPPI dengan Bank Indonesia, 2015).

Berdasarkan data komposisi kredit perbankan untuk UMKM sampai tahun 2017 porsi terbesarnya masih dipegang oleh Bank Persero, yaitu sebesar 50,4%, sementara Bank Swasta Nasional sekitar 32,6%, BPD 7,6% dan Bank Asing serta Campuran sekitar 0,8%. Gambar 1.1. menunjukkan komposisi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM.

Gambar 1.1 Grafik Penyaluran Kredit UMKM Tahun 2017

Sumber: Bank Indonesia, diolah

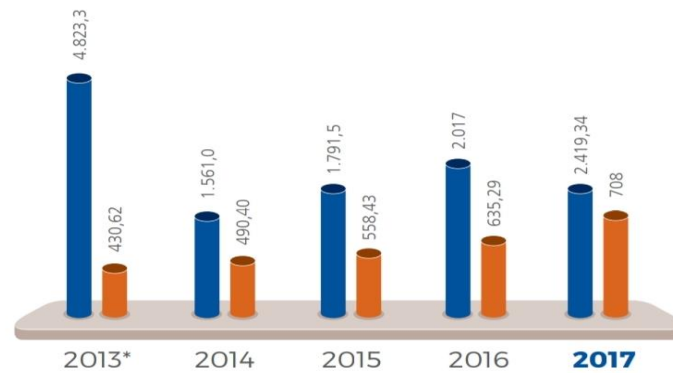


Fakta memang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah volume kredit UMKM terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan bank persero lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk memiliki jumlah penyaluran kredit segmen UMKM yang lebih besar.

Gambar 1.2 Grafik Penyaluran Kredit Tahun 2017

Sumber : Bank Rakyat Indonesia

### Kredit BRI VS Rerata Bank Umum Nasional Buku 4



GRAFIK PENYALURAN KREDIT  
(Rp triliun)

■ Perbankan Umum BUKU 4

■ Kredit BRI (bank saja)

\*) Pada tahun 2013 menggunakan data perbankan umum, belum tersedia data per kategori buku.

Penyaluran kredit perbankan, termasuk kredit UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah UMKM, suku bunga kredit, dan pertumbuhan ekonomi. Selain dari itu masalah dari UMKM sendiri terutama terkait akses kredit yaitu (1) Character karena watak/sifat dari nasabah dalam kesehariannya akan dinilai dalam kehidupan sehari-hari, kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. (2) Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. (3) Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba. (4) Collateral adalah barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan atau jaminan pada kredit yang diterimanya. (5) Condition of economic adalah dilihat dari berapa tanggungan nasabah, situasi ekonomi, politik dan lain-lain. (6) Constraint adalah batas atau hambatan suatu bisnis tidak bisa dilaksanakan tepat waktu contoh : bencana alam dll. Peningkatan UMKM dalam jumlah besar sangat potensial bagi pasar perbankan untuk meningkatkan kreditnya. Begitu juga dengan tingkat suku bunga kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan suku bunga pasar dapat mendorong bank untuk menyalurkan kreditnya guna memperoleh pendapatan yang optimal. Selain itu pula, kondisi

ekonomi yang stabil berperan penting dalam menjaga stabilitas pasar UMKM. Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan terbesar dari perbankan, oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dari aktifitas perkreditan, bank akan memperoleh pendapatan operasional berupa pendapatan bunga, provisi dan komisi. Pendapatan bunga merupakan sumber pendapatan terbesar dari bank. Pendapatan bunga akan diperoleh dari setiap angsuran kredit yang dibayar oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya setiap bulan. Setiap angsuran kredit yang dibayar, didalamnya sudah termasuk sejumlah pokok pinjaman ditambah dengan sejumlah bunga. Sementara pendapatan provisi diperoleh ketika pencairan kredit, sebesar persentase tertentu dari kredit yang diberikan. Pendapatan operasional merupakan salah satu komponen untuk menentukan besarnya laba operasional yang diperoleh dalam suatu periode. Selain pendapatan, besarnya laba juga dipengaruhi oleh beban. Memperoleh laba merupakan tujuan utama berdirinya suatu lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Laba yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, tetapi juga digunakan untuk ekspansi dimasa yang akan datang seperti pendirian kantor cabang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu lembaga keuangan terus-menerus memperoleh laba, maka ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin. Karena aktifitas terbesar bank adalah pada bidang perkreditan, maka dari aktifitas ini akan menentukan besarnya laba yang akan diperoleh dalam suatu periode.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul skripsi “Penyaluran Kredit Segmen UMKM Pada Laba PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kanca Jombang Tahun 2017.”



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, “Bagaimanakah penyaluran kredit segmen UMKM berpengaruh terhadap laba pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Jombang?”

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa jumlah penyaluran kredit segmen UMKM dapat mempengaruhi laba perusahaan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Jombang Tahun 2017.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum Perbankan di Indonesia dalam kaitannya dengan pertumbuhan laba perusahaan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Otoritas terkait, khususnya Bank Rakyat Indonesia sebagai tambahan informasi agar dalam pelaksanaan, fungsi, tugas, dan kewenangannya di masa mendatang dalam memberikan kredit segmen UMKM dapat berkontribusi dengan baik.
2. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dalam bidang perbankan khususnya kredit.
3. Masyarakat sebagai nasabah, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang salah satu faktor

yang mempengaruhi besarnya laba suatu bank adalah penyaluran kredit.

4. Almamater, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informs dan kontribusi bagi para akademisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang jumlah kredit pada laba.